

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi III / 2012

Pemerataan Kesempatan Kerja Bagi BUJK Kecil,
Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Saatnya Wilayah Perbatasan Di Bangun
Liputan Khusus Ke Pulau Nunukan, Kalimantan Timur.

Dibutuhkan SDM
Di Bidang Investasi Infrastruktur !!!

LEGALITAS LPJKN (Periode 2011 - 2015)
SK Menteri PU No. 223 Tahun 2011 Tidak Perlu Diragukan Lagi !!!



Kementerian Pekerjaan Umum



Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi

*Kunjungi dan Saksikan
Puncak Acara Konstruksi Indonesia 2012*

PAMERAN KONSTRUKSI INDONESIA 2012

Parkir Timur Senayan, 29 November - 02 Desember 2012

RANGKAIAN KEGIATAN KONSTRUKSI INDONESIA 2012 :

1. Lomba Pekerja Konstruksi dan Sarasehan Pekerja Konstruksi 2012
2. Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia
3. Lomba Jurnalistik/ Karya Tulis Media Cetak
4. Lomba Karya Tulis Ilmiah terkait Konstruksi
5. Penghargaan Karya Konstruksi
6. Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi
7. Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2012
8. Seminar dan Pameran Konstruksi Indonesia 2012

Ikuti Juga

Jakarta Construction Fun Bike & Fun Walk

Parkir Timur Senayan, Minggu, 02 Desember 2012

Informasi lebih lanjut :

Sekretariat BP KONSTRUKSI

Jl. Pattimura No 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Tlp : (021) 7266639, Fax : (021) 727 97 848

Email : datinfo25@yahoo.com

BULETIN BADAN
PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :
Mahbullah Nurdin.

Pemimpin Redaksi :
Hambali.

Penyunting / Editor :
Kristinawati Pratiwi Hadi;
Dendy Rahadian.

Redaksi Sekretariat :
Gigih Adikusomo;
Budiasih Dyah Saraswati;
Koko Gilang Nugroho;
Anjar Pramularsi;
Maria Ulfah.

Administrasi dan Distribusi :
Nanan Abidin;
Sugeng Sunyoto;
Agus Firngadi;
Ahmad Suyaman;
Ahmad Iqbal.

Desain dan Tata Letak:
Nanang Supriyadi;
Y. Bisma Wikantayasa.

Fotografer :
Sri Bagus Herutomo.

Alamat Redaksi :
Jl. Pattimura No.20
Gd.Bina Marga Lt.5 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
E-Mail : datinfo25@yahoo.com

Salam dari redaksi

Halo para pembaca Buletin Badan Pembinaan Konstruksi, salam hangat dan bersemangat dari kami terus menerus. Puji syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kepada Tuhan YME, karena kami selalu senang bisa terus bertemu dan berkorespondensi dengan Anda, walaupun hanya dua bulan sekali, Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi. Wujud apresiasi kami terhadap hal tersebut, kami ingin terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi anda.

Pada edisi III Mei - Juni 2012 ini kami hadir mengenai informasi penting terkait perkembangan dunia jasa konstruksi, akhirnya jelas keberadaan, LPJKN itu hanya satu, dan LPJKN versi munas dinyatakan tidak sah oleh PTUN Jakarta lewat putusan 05/G/2012/PTUNJKT dengan semakin tegas dan jelas keberadaan LPJKN ini Pemerintah mendapat mitra yang tepat dalam membina para pelaku konstruksi, begitupun dengan kontraktor kecil yang masih membutuhkan dorongan untuk maju berkembang sehingga lebih memperoleh kesempatan bersaing di jagat konstruksi Indonesia.

Bagaimana kabar tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi di Indonesia dan LPJK Provinsi ? seberapa jauh kesiapan mereka membentuk struktur usaha yang kokoh dan handal ? Permen PU No.08 tahun 2012 belum lama terbit, membutuhkan effort khusus dan spesial untuk implementasinya. PERMEN ini membahas tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi.

Redaksi berkesempatan berkunjung ke Pulau Nunukan, salah satu Kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki pulau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Lalu kita akan mengunjungi Aceh, tepatnya ke Balai Pelatihan Konstruksi, kita intip ada apa saja di sana. Lalu kenapa harus ada penyuluhan AIDS/HIV di sektor Ke-PU-an, silahkan bertanya, mengapa?

Pembaca yang budiman Buletin Badan Pembinaan Konstruksi berusaha untuk memahami keingintahuan anda, semoga bermanfaat dan Selamat membaca.

*Salam Hangat dan Bersemangat
_REDAKSI*

Daftar Isi

► Legalitas LPJKN (periode 2011 - 2015) SK Menteri PU No. 223 Tahun 2011 Tidak Perlu Diragukan Lagi !!!	2
► Pemerataan Kesempatan Kerja Bagi BUJK Kecil, Masih Menjadi Pekerjaan Rumah	3
► Mengukur Kesiapan Daerah Di Indonesia Dalam Membangun Indonesia Secara Holistic	7
► Saatnya Wilayah Perbatasan Di Bangun Liputan Khusus Ke Pulau Nunukan, Kalimantan Timur	10
► Dibutuhkan SDM Di Bidang Investasi Infrastruktur !!!	13
► Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Bidang Konstruksi Harus Terjamin	15
► Pencegahan Hiv & Aids Di Sektor Konstruksi	17
► Profil : Balai Pelatihan Keterampilan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh 'gerbang Harapan Konstruksi Di Bumi Andalas'	19



LEGALITAS LPJKN (Periode 2011 - 2015) SK MENTERI PU No. 223 Tahun 2011 TIDAK PERLU DIRAGUKAN LAGI !!!

PTUN Jakarta Tolak Gugatan LPJKN Versi Munas

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional Masa Bakti 2011-2015 (berdasarkan hasil MUNAS LPJK, Tanggal 30 September 2011) yang diwakili oleh Ir. Rendy Iamadjido, MBA dan Ir. S Poltak H Situmorang, SH dan Penggugat II Intervensi Perkorindo (Perkumpulan Komunitas Rekanan Indonesia) diwakili oleh Kusnadi Hutahaean, SH., yang menggugat Menteri Pekerjaan Umum, terkait SK Menteri PU No.223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Periode 2011-2015.

Melalui perkara nomor 05/G//2012/PTUNJKT, gugatan LPJKN Munas LPJK, ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam pembacaan putusannya, menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 telah memenuhi syarat-syarat kewenangan, formil/prosedur dan substansi, sehingga tidak mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, maupun cacat substansi.

Penerbitan Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 merupakan bagian dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun

2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dalam Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur.

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 telah diuji materiil oleh Ir. S Poltak H Situmorang, SH (salah satu Penggugat), namun hanya Pasal 10 ayat (4), Pasal 26, Pasal 29A, dan Pasal 29B, sedangkan pasal-pasal lain tetap berlaku dan mengikat secara hukum, termasuk Pasal 25 yang menjadi landasan terbitnya Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011.

Surat Keputusan tersebut diperlukan untuk mendukung Tugas dan Fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang telah dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai wadah resmi dalam melakukan pengembangan jasa

konstruksi yang salah satunya dalam mengeluarkan sertifikasi dibidang jasa konstruksi.

Menteri PU yang diwakili oleh Tri Djoko Waluyo menegaskan, "Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional harus tetap berjalan karena akan menetapkan pedoman pelaksanaan bagi tugas Lembaga Tingkat Provinsi tanpa adanya Pedoman pelaksanaan tersebut maka Lembaga Tingkat Provinsi tidak dapat bekerja sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan".

"Apabila permohonan Penggugat dikabulkan dalam Penundaan Objek sengketa dan dalam Pokok Perkara, maka akan berdampak pada tugas-tugas LPJK khususnya dalam hal penerbitan sertifikat sebagai salah satu syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta akan mengganggu kelancaran proses pengadaan konstruksi dan proyek-proyek yang sudah dijadwalkan dalam Tahun Anggaran 2012", Ujar Tri Djoko (Dnd).



SEMINAR NASIONAL

dengan tema:

“MEMBANGUN STRUKTUR
KONSTRUKSI NASIONAL YANG
MENUNJANG PEMERATAAN
KERJA BAGI SELURUH PELAKU
JASA KONSTRUKSI”



PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA BAGI BUJK KECIL, MASIH MENJADI PEKERJAAN RUMAH

Beberapa Permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam dunia konstruksi di Indonesia, terjadi ketimpangan dari pasar konstruksi sebagai piramida terbalik yang tidak menguntungkan bagi kebanyakan industri konstruksi skala kecil, karena industri skala besar dan menengah secara umum menguasai pasar konstruksi Indonesia yang cukup besar (90 %). Struktur usaha yang kokoh, andal, & berdaya saing belum terbentuk, dari jumlah kontraktor ±165.000 (penyedia jasa / BUJK), dengan kondisi kemitraan antara badan usaha besar, sedang, dan kecil belum maksimal terwujud, dengan jumlah kontraktor kecil yang terhitung banyak (±150.000), dengan jumlah yang kecil kontraktor swasta dan daerah, dan spesialis hampir tidak ada.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menyadari bahwa pekerjaan yang tidak mudah untuk mengupayakan agar struktur industri nasional dapat mencapai postur kokoh, andal dan

berdaya saing tinggi. “tantangan berat, karena bagian terbesar dari pengusaha jasa konstruksi kecil yang ada, umumnya tidak cukup kokoh dalam menghadapi fluktuasi pasar konstruksi yang ada, masih butuh peningkatan profesionalisme agar dapat menghasilkan produk konstruksi berkualitas”, ujarnya.

Hal yang menjadi jawaban agar tercipta rasionalisasi struktur industri konstruksi nasional, salah satunya, kontraktor kecil yang melaksanakan pekerjaan umum diarahkan untuk terspesialisasi, “mereka diharapkan bisa menjadi ahli, dengan pekerjaan yang spesialisasi khusus, sementara untuk para penyedia pasar yang masih mengarahkan pada paket pekerjaan umum, harus diarahkan dengan mendorong berkembangnya usaha spesialisasi”, Ujar Djoko kepada Wartawan saat jumpa Pers di Hotel Sultan, pada acara Seminar Nasional “Membangun Struktur Industri Konstruksi Nasional yang Kokoh dan Menunjang Pemerataan Kesempatan

Kerja bagi Seluruh Pelaku Jasa Konstruksi”, awal mei lalu, di Jakarta.

Seperti yang diketahui badan usaha jasa konstruksi (BUJK) kecil saat ini memiliki persentase jumlah ± 90 %, dan terpantau hanya handle 10-20% pekerjaan yang ada di Indonesia, berbeda kondisinya untuk kontraktor sedang & besar yang berjumlah sekitar 15.000 atau 10 % dari total keseluruhan BUJK yang ada di Indonesia, mereka handle 80-90% pekerjaan sektor konstruksi di Indonesia. Hal tersebut terpapar oleh Pakar Teknik Sipil ITB, Prof. Rizal Z Tamim, dan Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, Ismono, pada Lokakarya Nasional, Membangun Struktur Industri Konstruksi Nasional Yang Kokoh Dan Menunjang Pemerataan Kesempatan Kerja Bagi Seluruh Pelaku Jasa Konstruksi, di Jakarta, awal Juni 2012 lalu.

Sementara itu, pernyataan dari Asosiasi Penyedia Jasa, GAPENSI, mengutarakan,



kompetensi SDM dan keterbatasan penguasaan teknologi dan sistem manajemen.

“Adalah merupakan suatu urgensi, upaya yang kita lakukan kedepan terkait diskusi bentuk pola-pola kemitraan yang sudah ada dan yang mungkin dikembangkan dalam rangka membangun rantai pasok konstruksi nasional yang sinergis. Analisa hubungan antara kontraktor utama-subkontraktor-pemasok, hubungan kontraktor kecil-non-kecil, antara generalis dan spesialis”, Ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Bambang Goeritno, saat membuka Lokakarya tersebut .

bahwa regulasi yang mengatur keharusan BUJK asing bermitra dengan Badan Usaha Nasional belum maksimal dijalankan oleh banyak pengguna jasa, selain itu, kontraktor kecil yang terspesialisasi kurang berkembang, yang kecil rata-rata kontraktor umum, hal ini menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat, ujar Ketua Umum DPP Gapensi, Soeharsojo kepada Pemerintah.

“Butuh kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak untuk saling mendukung dalam mewujudkan konstruksi yang kita harapkan”, ujarnya lagi.

Terselenggaranya Lokakarya Nasional, pada 14 Juni 2012 ini dilakukan menindaklanjuti dari Seminar Nasional tentang Membangun Struktur Industri Konstruksi Nasional Yang Kokoh dan

Menunjang Pemerataan Kesempatan Kerja Bagi Seluruh Pelaku Jasa Konstruksi, di Jakarta, pada 9 Mei lalu. Pada Seminar ini diidentifikasi sebagai berikut, pertama, *Good governance* di industri konstruksi nasional masih menjadi masalah utama. Dua, struktur pasar dan struktur industri konstruksi masih mengalami ketidakseimbangan. Tiga, kontraktor spesialis belum tumbuh secara struktur. Empat, kerjasama antara kontraktor besar, menengah dan kecil serta mikro belum memiliki model yang saling menguntungkan. Lima, kontraktor besar belum semuanya mengambil peran pembinaan terhadap kontraktor kecil dan menengah. Enam, kapasitas, kompetensi dan daya saing kontraktor skala kecil dan menengah masih rendah dan memiliki keterbatasan akses permodalan. Tujuh, keterbatasan

Beberapa hal yang disoroti oleh Pakar Teknik Sipil dari ITB, Rizal Z. Tamin, mengenai kondisi hasil produk pekerjaan konstruksi di Indonesia, yaitu kualitas pekerjaan kontraktor masih rendah, konstruksi cepat rusak, kecelakaan konstruksi tinggi, kegagalan konstruksi dan bangunan masih terjadi. Selain itu, produktifitas kontraktor rendah, daya saing lemah, terbukti kalah bersaing dengan kontraktor asing yang beroperasi di Indonesia, sedikit yang berhasil masuk pasar global, tidak responsif terhadap permintaan tinggi tenaga kerja konstruksi regional, tidak ada kontraktor tenaga kerja konstruksi (*Labor Contractor*). Lapangan usaha terbatas, belum berkembang (KBLI). Harus segera dicarikan solusi.

Kebijakan Pengembangan Kemitraan Pelaku Usaha

Dalam makalahnya yang berjudul memperkuat Struktur Industri Konstruksi Nasional (Model, Prasyarat, dan Kebijakan), Rizal Z. Tamin, mengemukakan, pentingnya Revitalisasi mindset (profesionalisme & nasionalisme) untuk mewujudkan *good governance*. Lalu mendorong kompetisi yang sehat dan terbuka, dengan menghapus proteksi departemental dan regional di pemerintahan, serta kontraktor besar umum dapat melakukan pekerjaan dengan lintas provinsi.

Prof. Rizal pun mengarahkan agar dilakukan rekonstruksi sistem industri konstruksi dengan merestrukturisasi



lapangan usaha jasa konstruksi, dengan cara mengembangkan KBLI (11 lapangan usaha dan spesialisasi project cycle).

Selain itu dilakukan reformulasi konsep sertifikasi, registrasi, dan lisensi badan usaha sehingga dapat akan mengurangi entry barrier. Dan mereformulasi konsep sertifikasi tenaga ahli & tenaga terampil.

Lalu mengenalkan konsep integrasi rantai nilai berupa *Promote manajemen supply chain* (mengintegrasikan produsen, supplier, manufacture, sub-kontraktor, kontraktor), serta *Promote partnership* (kemitraan) : *joint operation dan joint venture*, kemitraan owner dan penyedia jasa bersama *supply chain*nya. Mempromosikan alternative pengiriman project seperti (CM, DB, BOT, PPP, dll).

Pemerintah dituntut dapat melakukan transformasi struktur pelaku usaha konstruksi : mengarahkan struktur pelaku usaha, bersamaan dengan kebijakan pemihakan. Kontraktor Umum, besar (kontrak tidak dibatas, boleh lintas provinsi). Kontraktor Sedang (maksimum Rp. 20-40M hanya di dalam provinsi). Kontraktor Spesialis diarahkan untuk spesialis pembangunan konstruksi (S/G/A/M/E/C/Manufaktur) dan Spesialis 'project cycle' (operasi, maintenance, rehabilitasi).

Faktor lain, sorotannya, yaitu keberadaan kontraktor tenaga terampil (*Labor Contractor*) yang sangat minim di

Indonesia diharapkan dapat tumbuh, karena secara strategis dapat mempermudah meningkatkan mutu tenaga kerja terampil, mempermudah pembinaan, meningkatkan kesejahteraan buruh, meningkatkan fleksibilitas dan agilitas sektor konstruksi, memfasilitasi ekspor tenaga konstruksi.

Pemerintah pun dapat mendorong kebijakan *subcontracting* dengan menderegulasi, memfasilitasi, dan mengawasi *subcontracting*. Meningkatkan jumlah dan memperkuat kemampuan kontraktor besar menjadi kontraktor umum.

Kebijakan membina kontraktor kecil untuk menjadi kontraktor spesialis harus terus didorong. Pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, peningkatan kemampuan teknologi, peralatan, dan inovasi, peningkatan kemampuan manajemen, fasilitasi kredit, jaminan, dan asuransi, juga harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah.

Selain itu Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang peran BUMN dan menugaskan BUMN melakukan *subcontracting* dan melakukan pembinaan kontraktor umum sedang dan kontraktor spesialis di daerah.

Kebijakan Pemerintah Pro Kemitraan
Pemerintah pada saat ini telah memiliki Kebijakan Pro Kemitraan melakukan regulasi dan fasilitasi, diantaranya : Permenpu 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. BUK Asing wajib bermitra dengan BUK Nasional MURNI untuk setiap pekerjaan

konstruksi. Penguatan penguasaan administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi maupun untuk ikatan subkontrak kepastian hukum antar pihak, mendorong spesialisasi Usaha antara lain melalui pengaturan subklasifikasi dan subkualifikasi, menggalakkan Pemberdayaan BUK terkait pengelolaan perusahaan. Masukan dan saran kepada Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, tentu menjadi sangat berarti, demi mencapai yang cita-cita yang diharapkan.

Sudut Pandang LKPP

Sementara itu LKPP menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh para penyedia jasa konstruksi, yang sering dilakukan pada umumnya kontraktor kecil yang dapat di kelompokkan pada pelanggaran etika dan kemampuan teknis.

Para penyedia jasa rata-rata terkena jenis sanksi, administrasi, denda, ganti rugi, daftar hitam, pidana. Orang perseorangan atau badan usaha yang dikenakan Sanksi yaitu orang perserorangan atau Badan Usaha dan individu yang menandatangani Penawaran dan Kontrak.

Beberapa hal berkaitan tanggungjawab yang dilakukan, badan usaha yang berkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi daftar Hitam, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan Badan Usaha yang bersangkutan dan badan usaha yang berkedudukan sebagai kemitraan maka sanksi daftar hitam dikenakan kepada masing-masing Badan Usaha.

Dukungan Permodalan dan Penjaminan
Dukungan dari segi permodalan dan penjaminan serta ketersediaan material/peralatan konstruksi juga perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka sinergisitas rantai pasok industri konstruksi. Bambang Goeritno sempat mengingatkan akan pentingnya sektor pendanaan ini. "Bagaimana Mekanisme dukungan keuangan bagi jasa konstruksi, khususnya kontraktor kecil, agar dapat meningkatkan kemampuan aliran tunai dalam menangani pekerjaan konstruksi, selain itu bagaimana mekanisme dukungan finansial yang

MENGEMBANGKAN KAPASITAS KONTRAKTOR KECIL DAN MENENGAH: PROGRAM DAN IMPLEMENTASINYA

oleh. Kepala Pusat Pembinaan UK, Ir.Ismono,MA.

Suatu perusahaan dapat dibina sehingga dapat mandiri dan berkembang secara berkelanjutan, bila mempunyai dan dapat memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- Mempunyai dana untuk membayar overhead.karyawannya .
- Mempunyai dana untuk biaya sertifikasi SKA dan SKTK karyawan .
- Mempunyai dana untuk sertifikasi SBU dan SIUK.
- Mempunyai dana untuk biaya pengembangan /management perusahaan/ISO/K3 dll.
- Mempunyai tanggung jawab terhadap K3.
- Program kesejahteraan karyawan/kesehatan /pensiun dll.
- Memperhitungkan kewajiban pajak PPH karyawan .
- Memperhitungkan kewajiban pajak PPN.
- Memperhitungkan kewajiban pajak final 2-3 % dari nilai kontrak..
- Memperhitungkan biaya sewa kantor.

dapat meningkatkan daya saing kontraktor nasional pada pasar konstruksi global", ujarnya.

Turut memberikan pandangan dari Bank Indonesia yang melihat sejak tahun 2002, pangsa pemberian kredit kepada sektor konstruksi meningkat pesat namun pangsa nya tetap rendah, yaitu dari 2,5% (th 2002) menjadi 3,5% atau 79 triliun (Maret 2012). Berbeda jauh pada pangsa pemberian kredit kepada sektor Industri Pengolahan (Rp.357 Trilyun), dan sektor perdagangan hotel dan restoran (Rp.423 Trilyun). Pada Pangsa kredit UKM (Maret 2012) yang disalurkan kepada sektor Konstruksi juga relatif rendah (sekitar 5% atau 23 Trilyun), sementara pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa masih menjadi prioritas (Rp.210 triliun dan Rp.89 triliun).

Berdasarkan jenis, pemberian kredit kepada sektor Konstruksi terutama masih dalam bentuk Kredit Modal Kerja (per Maret 2012 sekitar Rp56,4 triliun), Sumber pendanaan memberikan ruang yang besar masih pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp.310 triliun. Sementara pemberian kredit kepada sektor

konstruksi dalam rangka investasi masih relatif terbatas (per Maret 2012 sekitar Rp17,7 triliun) pada sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (masing-masing ±Rp.57 triliun).

Beberapa Permasalahan Pembiayaan Sektor Konstruksi, yang dikemukakan oleh BI pada Lokakarya ini, pada umumnya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur yang membutuhkan sumber dana berjangka panjang sementara struktur DPK bank cenderung berjangka pendek (terkonsentrasi pada deposito berjangka 1 bulan) sehingga cenderung berisiko relatif tinggi bagi perbankan, Perbankan memiliki keterbatasan dalam melakukan analisis kredit kepada sektor konstruksi terutama dikarenakan ketidakpastian. Terbatasnya skema penjaminan yang sesuai dan memadai menyebabkan tetap tingginya risiko, serta, keterbatasan agunan yang memadai untuk cover risiko.

BI telah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi hal tersebut, namun terdapatnya struktur dana bank yang cenderung berjangka pendek sementara pembiayaan konstruksi cenderung bersifat jangka panjang menyebabkan

cenderung berisiko tingginya pembiayaan bagi perbankan. Insentif yang diberikan Bank Indonesia melalui pelonggaran pengaturan perbankan dalam rangka mendorong pengembangan pembiayaan infrastruktur, antara lain melalui : Pengecualian bobot risiko yang rendah dalam perhitungan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) Bank terhadap pemberian kredit/fasilitas penyediaan dana pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN. Pengecualian BMPK bagi penyediaan dana kepada Pemerintah. Penempatan bank pada SUN dan SBI kolektibilitasnya digolongkan LANCAR dan bank tidak perlu membentuk "cadangan umum", ternyata kesemuanya belum cukup mendorong bank untuk lebih giat memberikan pembiayaan kepada sektor konstruksi, khususnya infrastruktur. Maka dari itu perlu diperluas alternatif sumber dana jangka panjang melalui penerbitan obligasi atau efek lainnya yang memiliki return menarik sehingga mendorong bank untuk berinvestasi pada SSB tersebut (dnd. Source: Lokakarya Nasional).



Mengukur Kesiapan Daerah di Indonesia dalam Membangun Indonesia Secara Holistic

(Laporan dari Rapat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi Provinsi)



Membangun Indonesia berarti membangun Provinsi dan Kabupaten serta Kota, bukan lagi kita membicarakan: membangun Indonesia berarti membangun ibu kota Jakarta. Konsentrasi sekarang terfokus pada Indonesia yang berwilayah Barat dan Timur, masih timbul kesenjangan antar wilayah tersebut, rata-rata Indonesia Bagian Barat (IBB) memiliki tingkat PDRB yang jauh lebih tinggi dibanding PDRB Indonesia Bagian Timur (IBT). Di IBT, baru Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua yang memiliki PDRB yang dapat diperhitungkan secara nasional. Kondisi makro sektor konstruksi tersebut dipaparkan oleh Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi, pada acara Rapat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi, Mei lalu.

Berbicara tentang pembangunan di sebuah negara tentu terkait dengan infrastruktur dan sektor konstruksi. Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam menciptakan pembangunan infrastruktur berkualitas, dan dengan menyediakan infrastruktur yang handal maka berdampak pada kemajuan kegiatan perekonomian rakyat maupun pertumbuhan dunia usaha.

Infrastruktur yang berkualitas berperan penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu pada kondisi makro sektor konstruksi lainnya disebutkan pula bahwa sumbangan sektor konstruksi terhadap PDB (Product Domestic Bruto) di Indonesia terus meningkat tahun 2009 dari Rp 555 T menjadi Rp 660,9 T pada tahun 2010 dan 756,5 T di tahun 2011, dengan nilai Kapitalisasi konstruksi dari Rp 170 T pada tahun 2009, menjadi Rp. 180 T di tahun 2010 dan 200 T pada 2011 lalu. Selain itu, Jumlah Perusahaan konstruksi meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 17 % per tahun, pada akhir tahun 2010 telah mencapai 162.853 perusahaan. Bagaimana dengan tenaga kerja di sektor ini? Jumlah tenaga kerja yang terserap ke sektor konstruksi terus meningkat, dari 5,44 jt pada 2009, meningkat 5,59 jt pada 2010, & 6,34 jt di tahun 2011.

Fenomena ini menunjukkan betapa krusial pembangunan infrastruktur

bagi tumbuh kembangnya perekonomian suatu Negara. Di satu sisi, masih banyak kekhawatiran di mata masyarakat kita dengan kejadian seperti, kegagalan bangunan, keruntuhan jembatan, jembatan kukar contohnya, lalu peristiwa terbaru yang diindikasikan bermuatan politis, Pusat Pelatihan Olahraga di Hambalang Bogor yang amblas, dan kegagalan-kegagalan lainnya. Dari peristiwa tersebut, wajar timbul pertanyaan di benak masyarakat Indonesia, kenapa bisa terjadi seperti itu? siapa yang salah? Bagaimana dengan kualitas tenaga kerja konstruksi di Indonesia? apakah selama ini memiliki kompetensi sesuai standar? Lalu bagaimana dengan syarat dan kemampuan badan usaha jasa konstruksi (BUJK) sebagai penyedia jasa di Indonesia? apakah betul BUJK tersebut mampu membangun? Belum lagi dari sisi soft ware, apakah kebijakan dan pengaturan pemerintah selama ini mendukung berbagai upaya percepatan pembangunan? misalnya, apakah masalah pengadaan barang dan jasa konstruksi mempersulit atau masih ditemukan celah KKN didalamnya? serta timbul pula pertanyaan, setelah semua pertanyaan sebelumnya muncul, lalu, bagaimana dengan ketersediaan material dan peralatan konstruksi? apabila jalan terus dibangun, jembatan terus di revitalisasi, bagaimana jika ditengah pembangunan tersebut tiba-tiba aspal habis? jangan sampai ditengah perjalanan pembangunan jalan dan jembatan tersebut tiba-tiba terhambat karena aspal yang habis, lalu tidak ada peralatan untuk membangun jalan dan jembatan tersebut. Bagaimana jika semua itu terjadi?

Pemerintah Tidak Tinggal Diam

Pemerintah sangat berperan untuk mengatur, memberdayakan, dan mengawasi proses jasa konstruksi yang terjadi khususnya pembangunan yang menggunakan dana APBN/APBD. Pentingnya Jasa konstruksi termaktub dalam Undang Undang Jasa Konstruksi



No. 18 Tahun 1999, di mana Pemerintah mengatur dengan menerbitkan peraturan dan standar-standar teknis tentang jasa konstruksi, lalu melakukan pemberdayaan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara dengan diberlakukannya otonomi daerah maka tak bisa dipungkiri peran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, memiliki peranan yang tidak dipisahkan dalam membangun infrastruktur berkualitas di daerah, maka dibentuklah pembina jasa konstruksi di pemerintah provinsi yang memiliki tugas dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah, memberikan kepastian bahwa penyedia jasa (badan usaha pelaksana dan konsultan serta tenaga kerja) memenuhi syarat administratif dan syarat kemampuan, mampu menyajikan database ketersediaan & lokasi material dan peralatan konstruksi, melakukan aturan main pemilihan penyedia barang / jasa secara konsisten lalu melakukan penanganan kegagalan konstruksi / bangunan sesuai ketentuan, selain itu Pembina jasa konstruksi melaksanakan monitoring dan evaluasi.



Unit kerja pembinaan di daerah merupakan urusan wajib pemerintahan sub bidang jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah. Untuk unit kerja pembinaan konstruksi provinsi, UKP jasa konstruksi daerah provinsi diselenggarakan paling rendah oleh unit setingkat eselon III/a, salah satu bidang pada pemerintahan provinsi yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang pekerjaan umum oleh dua dinas atau lebih, atau Unit pelaksana teknis (UPT) pada dinas yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang pekerjaan umum tersebut.

Selain itu di Pemerintah Provinsi juga dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah (TPJKD) untuk menjamin terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi daerah yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, efektif, dan efisien, serta untuk mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Organisasi TPJKD ini diketuai oleh Asisten Daerah Bidang Pembangunan, wakil ketua TPJKD adalah pejabat eselon II yang mengepalai bidang pekerjaan umum, untuk membantu operasionalisasi koordinasi pembinaan jasa konstruksi daerah dibentuk Sekretariat TPJKD yang diketuai oleh pejabat eselon III yang membawahi unit kerja pembinaan konstruksi daerah.

Sementara itu UUJK No. 18 tahun 1999 mensyaratkan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri, dan mengamankan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga diatur dalam peraturan pemerintah, lembaga itu dikenal dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). LPJK periode 2011 - 2015 ini terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. LPJK Provinsi pun telah dikukuhkan oleh Gubernur di Provinsi masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku.

LPJK adalah mitra strategis Pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan

sektor konstruksi, mereka yang melakukan sertifikasi dan registrasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja yang akuntabel dan profesional, Mendorong dan melaksanakan DIKLAT yang berkualitas secara simultan, melaksanakan Program LITBANG yang dapat menjawab kebutuhan teknologi dalam pembangunan infrastruktur nasional, Membantu Pemerintah dalam mendorong alih pengetahuan BUJK asing kepada BUJK nasional, membuat pedoman penyetaraan sertifikat BUJK dan Tenaga Kerja Jakon asing yang berpihak kepada jasa konstruksi nasional, Pelaksanaan penyetaraan sertifikat BUJK dan Tenaga Kerja JAKON asing yang akuntabel dan profesional.

Selain itu LPJK diharapkan dapat mendorong peran mediasi dan arbitrase dalam penanganan sengketa jasa konstruksi, LPJK Menindaklanjuti aspirasi pelaku jasa konstruksi nasional tentang kebutuhan akan mekanisme arbitrase sengketa jasa konstruksi yang spesifik di bidang jasa konstruksi dan dan berbiaya wajar, juga bersama Pemerintah memberikan dukungan berupa regulasi usaha untuk terciptanya lingkungan usaha yang kondusif, bersama Pemerintah mempersiapkan Infrastruktur pembinaan jasa konstruksi di tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Hal tersebut di atas merupakan proses menuju sebuah kebaikan dari sebuah sistem yang sedang dibangun, sedikitnya dapat menjawab dari permasalahan yang terjadi, tentu ini, adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu dengan tidak sebentar.

Strategi Delivery Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah

Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU, melakukan strategi dalam melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah dengan menggunakan dana APBN diantaranya Uji coba dekonsentrasi di 12 provinsi (2010) dan uji coba dekonsentrasi full scale di 28 provinsi (2011). Hasil dari Konreg usulan kegiatan Pusat di daerah dengan besaran Rp 28,82 Milyar untuk Wilayah Barat (20 prov) dan Rp 21,47 M untuk Wilayah Timur (13 prov), salah satu alternatif strategi *delivery* tersebut

adalah Pusat (Kementerian PU) berperan sebagai SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) dan daerah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang dilengkapi dengan Bendahara Pembantu.

Kementerian PU pun saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RAPERMEN) tentang Pedoman Pembinaan Jasa Konstruksi yang kelak akan dipergunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pembinaan jasa konstruksi yang efektif dan efisien. Dengan ruang lingkup pola dan kerangka kerja pembinaan, tata kelola pembinaan, sistem informasi pembinaan, monitoring dan evaluasi pembinaan, dan pembiayaan pembinaan.

Pola pembinaan jasa konstruksi adalah prinsip-prinsip peran pemerintah dalam melaksanakan usaha peningkatan kapasitas jasa konstruksi. Pola pembinaan jasa konstruksi disebut piramida pembinaan, Piramida pembinaan jasa konstruksi adalah arah pembinaan yang menekankan pendelegasian wewenang Pemerintah kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.

PERMEN PU No.08 Tahun 2012 Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMEN PU No. 08 tahun 2012) tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi dan telah disahkan di Kementerian Hukum dan HAM pada awal Mei 2012 lalu. Permen PU ini yang akan ditindak lanjuti oleh LPJKN dalam membuat Peraturan Lembaga (PERLEM) Registrasi mengenai SBU yang baru, dan Perlem tentang asosiasi, serta pada masa sebelum Agustus 2012 akan ada norma konversi klasifikasi : ASMET dan kualifikasi : Gred. PERLEM 02 tahun 2011

ini dibatasi sebagai peraturan transisi hingga sebelum 1 Agustus 2012.

Saat ini pun Kementerian PU sedang melakukan pelatihan Asessor sebagai pemenuhan target dalam membentuk Unit Sertifikasi BUK dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja di Pusat dan Daerah. Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, dan Asesor. Di PERMEN ini pun dijelaskan tentang pembentukan dan tugas unsur pengarah, serta pembentukan unsur pelaksana dan penetapan asesor. Berikut norma konversi tercantum dalam tabel dibawah ini.

PERLEM 11A / 2008		RAPERLEM 2012	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid	Agensi sub-bid		
21001	Perumahan tunggal dan koppel	BG001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal
21004	Bangunan Komersial	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial
		BG005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Militer Publik
		BG006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya
22001	Jalan Raya, Jalan Linggungan	S003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
22002	Jalan kereta Api		
22003	Lapangan Terbang dan Runway		
22008	Pelabuhan atau dermaga	S001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
22009	Drainase kota		
22010	Bendung		
22011	Irigasi dan Drainase		
22012	Perunggalan Rawa dan pantai		
22013	Bendungan		
22014	Pengerukan dan Pengurukan	SP003	Pekerjaan Penyalpan dan Pematanan tanah/tokasi
23005	Instalasi Lift dan Eskalator	M0005	Jasa pelaksana pemasangan lift dan tangga berjalan
24001	Pembangkit tenaga listrik semua daya	EL001	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik semua daya
25003	Perpipaan air bersih dan limbah	S005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh
		S006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh
		S008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
		S009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
25004	Pengolahan air bersih	S002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan Sampah, Bangunan Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
25005	Instalasi pengolahan limbah		
25006	Pekerjaan pengeboran air tanah	SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam
25007	Reboisasi dan penghijauan		

Konversi Sub-klasifikasi Perencana Pengawas Konstruksi

Konversi Sub-Klasifikasi Jasa Konstruksi

PELAKSANA KONSTRUKSI		
Gred 1	Hasil Penilaian Kemampuan Keuangan, Pengalaman dan SDM	P
Gred 2		K1
Gred 3		K2
Gred 4		K3
Gred 5		M1
Gred 6		M2
Gred 7		B1
		B2

PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI		
Gred 1	Hasil Penilaian Kemampuan Keuangan, Pengalaman dan SDM	P
Gred 2		K1
Gred 3		K2
Gred 4		M1
Gred 5		M2
Gred 6		B

PERLEM 11A / 2008		RAPERLEM 2012	
Kode	Sub-bidang, sub - layanan	kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid			
11001	Jasa Nasihat/Pra Desain, Desain dan Administrasi kontrak bisnis	S001	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
		S002	Jasa Desain Arsitektural
11003	Jasa Desain Interior	S004	Jasa Desain Interior
12001	Jasa Nasehat/Pra-Desain Engineering Bangunan	RE102	Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
13001	Jasa Desain Enjiniring Mekanikal	RE105	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
14001	Jasa Desain Enjiniring Elektrikal	RE106	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
15001	Jasa konsultansi lingkungan	PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap
15002	Jasa Perencanaan Urban	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
16001	Jasa survey permukaan		
16002	Jasa pembuatan peta		
17001	Jasa engineering lainnya		
17002	Jasa komposisi dan komunikasi analisis		
31001	Jasa engineering fase konstruksi dan instalasi bangunan gedung	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
31002	Jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi	RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
31004	Jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya		
31006	Jasa engineering fase konstruksi dan instalasi sistem kontrol lalu lintas		
32001	Jasa management proyek terkait konstruksi bangunan		
32002	Jasa management proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi		
32006	Jasa management proyek terkait konstruksi sistem kontrol lalu lintas		
33000	Jasa engineering terpadu		

SAATNYA WILAYAH PERBATASAN DI BANGUN

Liputan Khusus ke Pulau Nunukan, Kalimantan Timur



Daerah perbatasan di suatu Negara selalu menjadi perhatian khusus oleh negara-negara di dunia, mengapa ? dalam pengalamannya, berbagai permasalahan wilayah perbatasan antar Negara ini dapat memicu krisis hubungan yang tidak baik antara negara yang terlibat. Status “genting” layak disematkan jika persoalan perbatasan berkaitan dengan sengketa lahan, atau pengklaiman sebuah wilayah. Mengingat peran dan fungsi dari kawasan perbatasan yang memiliki nilai geopolitics yang tinggi dan mencerminkan jatidiri Bangsa Indonesia dimata Internasional. Sedangkan, dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, perbatasan merupakan suatu “recognisi” kedaulatan sebuah Negara, khususnya mencerminkan harkat martabat dan harga diri bangsa.

Dalam analogi lain, seseorang membeli dan memiliki rumah tinggal harus jelas secara de facto dan de jure memiliki akte tanah dan sertifikat, di sekat di pagari, untuk kemudian diakui oleh negara (Badan Pertanahan Negara) dan masyarakat umum.

Tak jarang perbatasan antara Negara dapat menimbulkan konflik berdarah, munculnya potensi konflik yang terjadi antara 2 (dua) negara yang berkepentingan diyakini akan mengundang banyak perhatian. Ancaman tersebut bisa melebar menjadi pertikaian yang berasal dari konflik perbatasan.

Kita bisa melihat bagaimana hubungan tidak harmonis yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, pertumpahan darah diiringi baku tembak yang terjadi, peristiwa tersebut menarik perhatian negara lain sehingga digelar *Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting* (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Selain Thailand, kita dapat melihat konflik batas China dan India, lalu perbatasan antara India dan Pakistan, antara Bangladesh-Birma, Korea Utara dan Korea Selatan, atau antara Jepang dan Rusia yang kesemuanya berujung pada konflik, yang sebenarnya, tidak diinginkan oleh siapapun.

Bagaimana di Indonesia ? Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki perbatasan setidaknya dengan 13 (tiga belas) negara. 3 (tiga) negara diantaranya berbatasan langsung dengan darat (dalam satu pulau), diantaranya Negara Malaysia di Kalimantan, Papua New Guinea di

Papua, dan Timor Loro Sae di pulau Timor.

Di Pulau terbesar di Indonesia ini telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berupa Kawasan Strategis Nasional, yaitu Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) yang meliputi sebagian wilayah darat dari tiga Provinsi di Pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008. Kawasan perbatasan darat Indonesia Malaysia di pulau Kalimantan secara administrative meliputi 2 (dua) provinsi yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Garis perbatasan darat di pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Negara bagian Sabah dan Serawak Malaysia, secara keseluruhan memiliki panjang sekitar 2.004 KM, Panjang perbatasan di Kaltim dengan Malaysia sepanjang 1038 KM, dan panjang perbatasan di wilayah Kalimantan Barat Pontianak-Malaysia sepanjang 966 KM.

Akhir Mei lalu, seperti yang dikutip dari beberapa sumber, 3 (tiga) Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Agung Laksono (Menkokesra), Djan Fariz (Menteri Perumahan Rakyat), dan Gamawan Fauzi (Mendagri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) termasuk wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, melakukan visit ke kecamatan sebatik, Kabupaten Nunukan. Dalam sambutannya, Menko Kesra Agung Laksono berupaya akan



membenahi kehidupan warga di wilayah perbatasan. Pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan dan percepatan ekonomi dinilainya sebagai langkah yang tepat dilakukan.

Mendagri kepada wartawan menjelaskan bahwa kunjungannya sebagai BNPP dengan membawa kementerian yang terkait dengan BNPP, berkunjung dalam rangka mempelajari sikap yang akan dilakukan dan harus dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. "Pemerintah mengupayakan peningkatan kesejahteraan maupun pertahanan dengan akan dibangunnya bandara Long Bawan di Kecamatan Krayan, Kab.Nunukan", terang Gamawan. Pemerintah telah merancang dan merencanakan pembangunan wilayah perbatasan termasuk di Nunukan sekitar Rp. 700 Milyar.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak ketika dikonfirmasi terkait rancangan pembangunan di perbatasan sesuai intruksi Kepala BNPP mengatakan akan ada banyak pembangunan yang dilakukan di daerah Kalimantan Timur khususnya daerah perbatasan, termasuk akan dibukanya akses darat menuju Krayan.

Anggaran dan perencanaan yang dipersiapkan untuk perubahan cara pandang daerah perbatasan. Perubahan cara pandang itu untuk mengimbangi kemajuan pembangunan kota-kota negara tetangga yang letaknya tidak jauh dari wilayah Indonesia, yang umumnya tertinggal. Wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan nantinya akan menjadi garda terdepan Indonesia. Pembangunan infrastruktur juga akan dibarengi pembangunan pada sektor energi, pendidikan dan kesehatan untuk membuka isolasi.



Dengan tingginya intensitas pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Pusat dan Daerah di Kalimantan Timur, direpson positif oleh Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum. Melalui Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III Banjarmasin, Pusbin Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi telah melakukan pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung di Kabupaten Nunukan, pada 29



Mei 6 Juni 2012 lalu. Pelatihan dilakukan dengan kerjasama Badan Pembinaan Konstruksi, Dinas PU Kab. Nunukan, LPJK Prov Kalimantan Timur, dan IALKI (Ikatan instruktur dan asesor pelatihan konstruksi Indonesia).

Gaung hari kebangkitan nasional di bulan mei lalu diharapkan dapat mengingatkan kembali secara khusus kepada kontraktor dan konsultan lokal serta SDM jasa konstruksi Kab. Nunukan secara umum agar bangkit dan menunjukkan kualitas dan komitmen pelaksanaan pekerjaan yang baik dan terjaga. Ada pameo menjadi "tuan di rumah sendiri", diharapkan benar terealisasi pada rencana pembangunan yang berkembang di depan.

Partisipasi peserta khususnya dan para asosiasi penyedia jasa konstruksi di Kab Nunukan ini menunjukkan peran aktif masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999, dimana setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat sebagai bentuk pengakuan resmi atas kompetensi dan kualitas tenaga kerja itu sendiri.

"Kondisi Infrastruktur Kabupaten Nunukan yang akan mengalami pembangunan dan rencana pengembangan yang cukup besar dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, membutuhkan tenaga kerja konstruksi siap pakai dan kompeten, sinyal tersebut harus menjadi "sinyal kuat" bagi para SDM penyedia jasa konstruksi khususnya di Kabupaten Nunukan untuk mempersiapkan diri", ujar Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III Banjarmasin, Bambang Irawan.

Pelatihan yang dilakukan oleh Balai Wilayah III Banjarmasin ini menunjang pelaksanaan peningkatan kualitas SDM Pekerja Konstruksi Wilayah Kalimantan secara keseluruhan, Balai ini memiliki Link (koneksi) Instruktur & Asesor yang sudah berpengalaman dan kompeten dibidangnya, memiliki kumpulan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam berbagai bidang jabatan kerja konstruksi mulai

dari level terampil (tukang, mandor, hingga pelaksana) dan level ahli, juga dilengkapi modul-modul bimbingan teknis, pelatihan, dan uji kompetensi yang disusun oleh tim konsultan yang berpengalaman di bidangnya. Balai ini pun melakukan Sertifikasi Kompetensi yang akan diberikan kepada para peserta pelatihan dan uji kompetensi yang telah dinyatakan kompeten (dnd).

RENCANA PEMBANGUNAN JALAN WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR

Terkait pembangunan jalan dikawasan perbatasan, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan terbukanya akses jalan ke wilayah yang terisolasi. Saat ini Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum telah memprogramkan untuk penanganan Jalan Nasional maupun Strategis Nasional Rencana (SNR) menggunakan dana Loan ADB untuk ruas Sp. Apas Simanggaris (section 1), Sp. Apas Simanggaris Bts. Negara /Serudong (section 2) yang merupakan Lintas Utara/Perbatasan dengan peningkatan struktur jalan (dalam proses lelang), Ruas Malinau Mensalong Sp.3 Apas, Ruas Jalan Simanggaris Sei Ular/Nunukan serta Ruas Jalan Lingkar Pulau Sebatik ditangani menggunakan dana APBN dengan pemeliharaan berkala dan peningkatan struktur jalan.

Saat ini sedang diprogramkan pembangunan jalan baru di ruas Malinau Long Bawan (pendanaan APBN 2012) serta Mensalong Tou Lumbis (pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih 2011/SAL) di Kabupaten Nunukan.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga juga berkomitmen untuk membuka jalan paralel perbatasan/Lintas Utara Kalimantan Timur dari Long Kemuat sampai dengan Long Nawang (Kabupaten Malinau) dan Long Pahai sampai dengan Batas Kalbar (Kabupaten Kutai Barat) yang didanai dari pemanfaatan SAL.

Terkait dengan perbaikan kondisi jalan kecamatan/desa, perlu diinformasikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ruas Jalan Kabupaten merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten.

Serta Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan menyatakan bahwa penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan pengalokasian dana dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan, berasal dari dana penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. (Puskompu - Ditjen BM)

Dibutuhkan SDM Di Bidang Investasi Infrastruktur !!!

KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) dapat Menunjang Percepatan Pengembangan Investasi Infrastruktur

Sebagaimana yang telah diketahui, Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Peran infrastruktur sangat penting dalam proses produksi dan distribusi ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain di seluruh penjuru dunia. Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan unsur yang penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri dan perdagangan.

Kondisi beberapa infrastruktur fisik dasar yang penting, antara lain : jalan raya, irigasi dan air bersih mulai memprihatinkan sejak tahun 1997-1998 kondisi tersebut telah mengalami perbaikan sejak tahun 2006, namun belum memenuhi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tidak memadainya kondisi infrastruktur fisik tersebut, jelas akan mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Sementara itu, anggaran pembangunan infrastruktur yang mampu disediakan oleh Pemerintah tidaklah memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Karena itu, perlu ditemukan suatu sistem dan struktur alternatif pembiayaan infrastruktur fisik di Indonesia. Sistem dan struktur alternatif yang dimaksud adalah suatu sistem dan prosedur pembiayaan infrastruktur fisik yang efisien dengan melibatkan dan meningkatkan peran swasta dan lembaga keuangan (Investor).

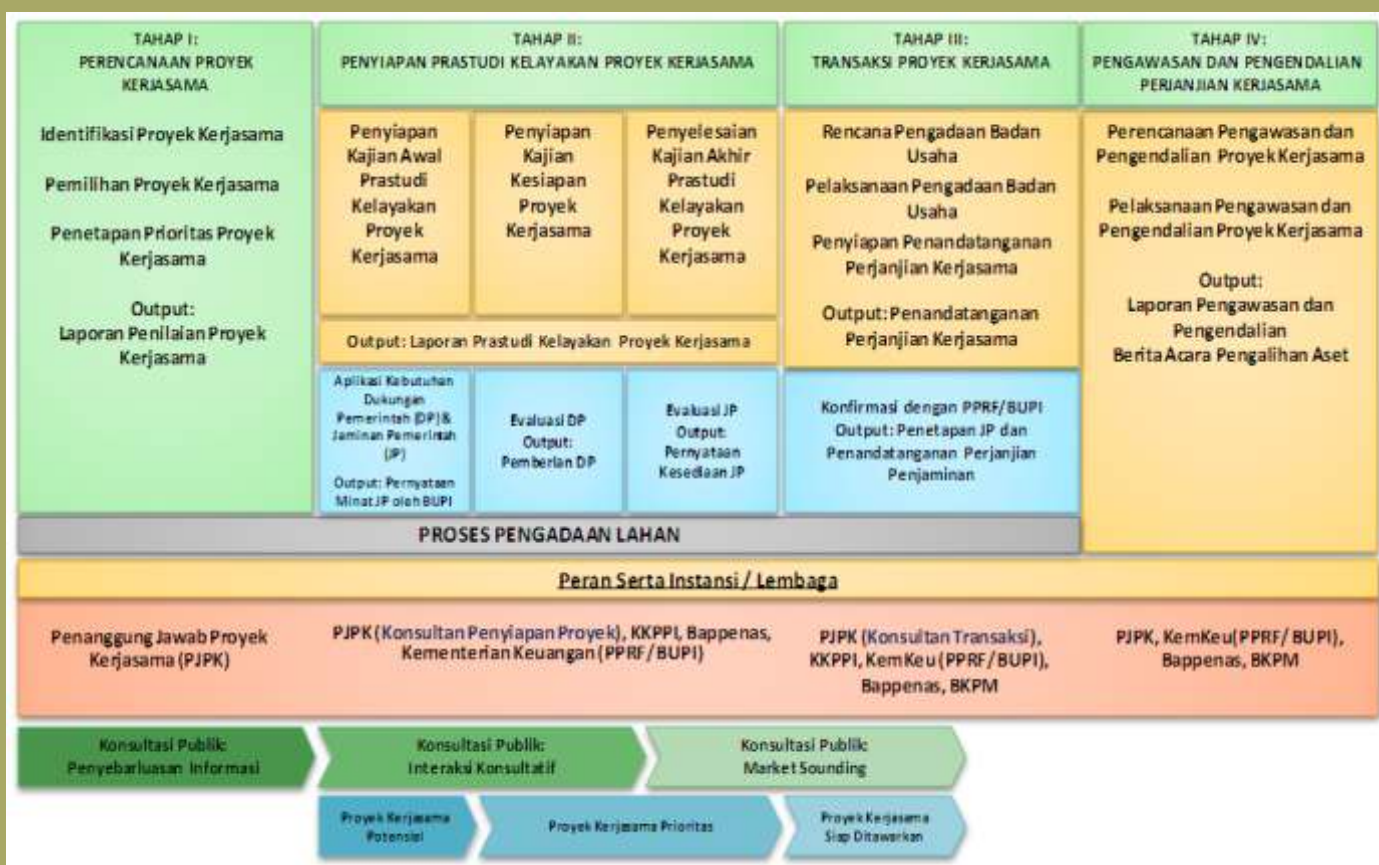
Pengembangan alternatif pembiayaan berupa peningkatan peran swasta dan lembaga keuangan (Investor) dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut membutuhkan tenaga-tenaga yang kompeten dan profesional baik di sektor publik maupun sektor swasta. Pengadaan tenaga-tenaga profesional tersebut khususnya bagi Pejabat Pemerintah sebagai regulator dapat dilakukan dengan melalui pelatihan-pelatihan, antara lain Pelatihan Peningkatan Peran Swasta dan Lembaga Keuangan (Investor) dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur.



Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (Pusbin SDI), Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum awal semester II tahun 2012 ini mengadakan kegiatan Pelatihan Investasi Infrastruktur, diharapkan SDM di Indonesia dapat mengembangkan kemampuan sumber daya manusia khususnya kepada para regulator dan investor serta para stakeholder terkait untuk lebih dapat meningkatkan pengetahuan di bidang Investasi khususnya bidang jalan tol dan bidang air minum.

Pusbin SDI berusaha merespon kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam menyiapkan dan menyelenggarakan proyek KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta). KPS dapat membantu dalam menunjang percepatan pengembangan investasi infrastruktur di mulai dari tahapan pelaksanaan KPS, pedanaan infrastruktur, bagaimana penyiapan proyek KPS, kebijakan-kebijakan yang mendorong KPS dan lain sebagainya dalam rangka mendukung pengembangan investasi infrastruktur. Berikut ini dijelaskan tahapan pelaksanaan KPS adalah sebagai berikut:





Tabel.1 Tahapan Pelaksanaan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta)

Sebagaimana yang terlihat di tabel 1, dalam tahapan pelaksanaan proyek KPS Tahap I dimulai dengan Perencanaan Proyek Kerjasama yang dibagi menjadi 3 yaitu Identifikasi Proyek Kerjasama, Pemilihan Proyek Kerjasama dan Penetapan Prioritas Proyek Kerjasama yang menghasilkan output berupa Laporan Penilaian Proyek Kerjasama. Kemudian dilanjutkan dengan Tahap II yaitu Penyiapan Pra-studi Kelayakan Proyek Kerjasama, Tahap III Transaksi Proyek Kerjasama, dan yang terakhir Tahap IV yaitu Pengawasan dan Pengendalian Perjanjian Kerjasama untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada chart diatas.

Dalam menunjang percepatan pengembangan infrastruktur dalam penyelenggaraan proyek KPS ada dua konsep yang harus diterapkan agar dapat menciptakan iklim investasi yang sehat yaitu :

Transparency
yaitu menciptakan kejelasan dan kepastian iklim investasi baik tingkat nasional maupun daerah untuk menarik investor, diantaranya melalui: kejelasan

peraturan perundang-undangan; Kejelasan prasyarat dan syarat berinvestasi; Kelengkapan analisa kelayakan proyek investasi; Informasi kemampuan dan kemauan partner lokal; Informasi kemampuan industri penunjang untuk mendukung proyek investasi; Kejelasan pembagian risiko proyek investasi; Kejelasan jaminan dan dukungan pemerintah;

Predictability
yaitu menciptakan iklim investasi yang dapat diprediksi khususnya bagi investor

sehingga dapat mengurangi keraguan investor untuk menanamkan modalnya, diantaranya melalui: Kejelasan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk berinvestasi; Tingkat akurasi kelayakan proyek investasi; Tingkat akurasi informasi kemampuan dan kemauan partner lokal; Tingkat akurasi informasi kemampuan industri penunjang untuk mendukung proyek investasi; Tingkat akurasi mitigasi risiko investasi; Komitmen pemerintah dalam penyediaan jaminan dan dukungan (Ggh).



KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI BIDANG KONSTRUKSI HARUS TERJAMIN



Mungkin sebagian pembaca pernah mendengar sebuah tayangan di televisi atau berita di surat kabar, dimana sebuah keluarga harus kehilangan sosok seorang pemimpin kepala rumah tangga, sang ayah harus berpulang lebih cepat menghadap sang Khalik, meninggalkan seorang istri, dan 2 orang anak yang masih duduk dibangku SD dan SMP. Setelah di teliti lagi penyebab meninggalnya ayah dari 2 orang anak itu karena Tower Crane yang ia tumpangi terjatuh dari ketinggian 100 meter. Innalillahi... Anda bisa membayangkan jika itu menimpa keluarga anda. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam menerima segala kehendakNya.

Ada yang mengatakan bahwa kecelakaan itu sebuah takdir. Takdir bisa dikatakan sebuah ketentuan baik buruk yang telah digariskan oleh Tuhan.

Namun beberapa ahli manajemen mengatakan dengan "bahasanya", bahwa inspirasi hanya 1%, sisanya yang 99% adalah perspiration berupa usaha yang tidak mengenal lelah. Tanpa adanya usaha yang keras dan fokus, maka semua ide atau dalam bahasa spiritual, takdir, menjadi tidak dapat diwujudkan secara nyata, lalu ide hanya angan-angan saja. Usaha tetap menjadi sarana utama untuk mencapai dan mewujudkan ide atau Takdir tersebut. Dengan adanya usaha kita dalam memahami dan mengantisipasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, setidaknya kita akan mampu meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang

perlindungan tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja dan kesehatan kerja serta upaya meminimalkan terjadinya kecelakaan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Salah satu kebijakan tersebut berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMEN PU) No. 09 tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang diterbitkan oleh Menteri PU yang dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaku konstruksi nasional dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi agar dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.

Apabila diidentifikasi jenis atau ragam kecelakaan kerja, yang terjadi di sektor konstruksi sangat beragam, mulai dari urusan kaki yang tercolok paku hingga jatuh dari ketinggian, (seperti kasus dari atas.red) saat mengerjakan proyek pembangunan bangunan bertingkat, semua bisa terjadi. Konsep keselamatan konstruksi menurut Davies dapat didefinisikan bebas dari resiko luka dari suatu kecelakaan di mana kerusakan kesehatan muncul dari akibat langsung maupun jangka panjang.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat akan pentingnya keselamatan konstruksi maka perlu sebuah acuan atau aturan



yang dapat mendukung terciptanya pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang aman dan selamat. PERMEN PU No.09 tahun 2008 telah tersosialisasikan dengan baik kepada para stake holder konstruksi, pengguna jasa baik penyedia jasa. Terbitnya Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, lalu ada perubahan istilah pada jabatan, serta adanya berbagai masukan untuk memperluas cakupan aturan SMK3 yang tidak hanya terbatas pada sektor konstruksi namun dipertimbangkan untuk penggunaan bangunan yang berarti bagi pengembangan dan perubahan terhadap substansi peraturan Menteri tersebut.

Kementerian PU melalui BP Konstruksi berkewajiban untuk melakukan penyesuaian atas pasal dan lampiran yang dianggap sudah "lawas".

Review sekilas tentang SMK3 PERMEN PU nomor 09 tahun 2008
Dunia konstruksi melibatkan setidaknya 3 (tiga) pihak, penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat umum Seperti yang diketahui, kegiatan yang dilaksanakan oleh pengguna jasa/penyedia jasa terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultasi, dan kegiatan swakelola. Selain itu keselamatan dan kesehatan kerja di sektor konstruksi dikelompokkan sebagai resiko tinggi, sedang dan kecil. Untuk kriteria Kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 konstruksi

dibagi menjadi "baik" bila hasil penilaian di atas > 85%, "sedang" bila mencapai 60%-85%, dan "kurang" bila mencapai dibawah < 60%.

Beberapa hal yang berkaitan dengan aspek kepemimpinan, dalam hal ini Kepala Satuan Kerja, harus memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang PU dalam organisasi pengguna jasa pada DIPA satuan kerja. Perhitungan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi bidang PU tersebut sudah merupakan satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan konstruksi. Untuk penyelenggaraan SMK3 konstruksi harus dibuat rencana keselamatan dan kesehatan kerja kontrak (RK3K) oleh penyedia jasa dan disetujui oleh penggunajasa.



Sedangkan untuk prasyarat menjadi penyedia jasa, ditetapkan mereka wajib membuat pra RK3K sebagai salah satu kelengkapan penawaran sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam proses pengadaan barang/jasa yang diikuti. Kemudian PPK (pejabat Pembuat Komitmen) memberi penjelasan tentang resiko K3 Konstruksi termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) yang ditenderkan. PPK pun harus menetapkan ahli K3 Konstruksi atau petugas K3 Konstruksi untuk pengendalian K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat resiko K3 pada paket kegiatan yang dikendalikannya.

Pengguna jasa wajib melibatkan ahli K3 konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai resiko K3 tinggi, atau setidaknya petugas K3 sedang dan kecil. Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan tingkat resiko tinggi wajib memiliki sertifikat K3 perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pemerintah meminta kalangan pengusaha jasa konstruksi untuk memperhatikan jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja selama masa kontrak kerja berjalan. (DND)

Pencegahan HIV & Aids DI SEKTOR KONSTRUKSI

Beberapa tahun yang lalu, saat kegiatan *Support for HIV and AIDS Prevention in Infrastructure Projects* dilakukan oleh Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, orang bertanya-tanya apa hubungannya antara HIV dan AIDS dengan Kementerian PU?

Bermula pada tahun 2009, program “Support for HIV and AIDS Prevention In Infrastructure Projects” dilaksanakan melalui Bantuan Teknis / *Technical Assistance (TA)* dari *Asian Development Bank (ADB)*, finance by ADB Japan special fund sesuai dengan dokumen proyek no. 40130 Desember 2007 sebagai bagian dari Road Rehabilitation 2 Project Consultations.

Dengan tujuan untuk membantu upaya mitigasi resiko HIV terkait dengan pembangunan infrastruktur, khususnya diarahkan pada perilaku pekerja yang beresiko tinggi dalam sektor konstruksi, out come dari TA ini adalah strategi dan mekanisme pelaksanaan pencegahan HIV untuk sektor konstruksi, termasuk modul pelatihan / kampanye serta TOT



bagi aparat Departemen Pekerjaan Umum (tahun 2009 masih departemen-red). BP Konstruksi yang masih bernama Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (saat itu) bertindak sebagai *Executing Agency*.

AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) merupakan kumpulan gejala penyakit dan infeksi yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus yang

disebut HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan pengidap HIV (Orang Dengan HIV AIDS / ODHA) amat rentan dan mudah terjangkit macam-macam penyakit. Sejak tahun 1981 HIV telah menjangkiti jutaan orang di dunia dengan perkembangan yang terus meningkat.

Hari AIDS Sedunia di Indonesia pada Desember 2011 yang lalu mengusung tema Lindungi Pekerja dan Dunia Usaha dari HIV dan AIDS. Sebagian besar kasus HIV baru ditemukan dalam lingkungan kerja dan dunia usaha.

Yang mengejutkan, sektor konstruksi termasuk dalam sektor yang rawan dengan penularan HIV. Menurut data yang ada, penyebaran terbesar HIV melalui 4 “M” macho, men, mobility and money dan keempat faktor tersebut ada dalam sektor konstruksi.

Pekerja konstruksi dianggap rentan terhadap HIV dan AIDS. Tidak seperti populasi mobile lainnya (buruh migran, sopir truk, nelayan, dan militer), pekerja konstruksi adalah kelompok yang unik. Mayoritas dari pekerja konstruksi adalah



laki-laki, tinggal jauh dari keluarga dan pasangan mereka untuk jangka waktu lama di satu lokasi dan kemudian pindah ke lokasi lain, terlibat dalam kondisi kerja terisolasi dan sulit dengan tekanan batas waktu, aksesibilitas dan ketersediaan pekerja seks di dekat lokasi konstruksi, dan budaya macho yang secara sosial dapat menerima kaum pria memiliki banyak pasangan maupun tekanan teman untuk mengunjungi pekerja seks tinggi dalam beberapa kelompok laki-laki (National Center for HIV AIDS / NCHADS 2002). Dengan karakteristik ini, pekerja konstruksi juga dikenal memiliki kriteria 4 "M" tersebut.

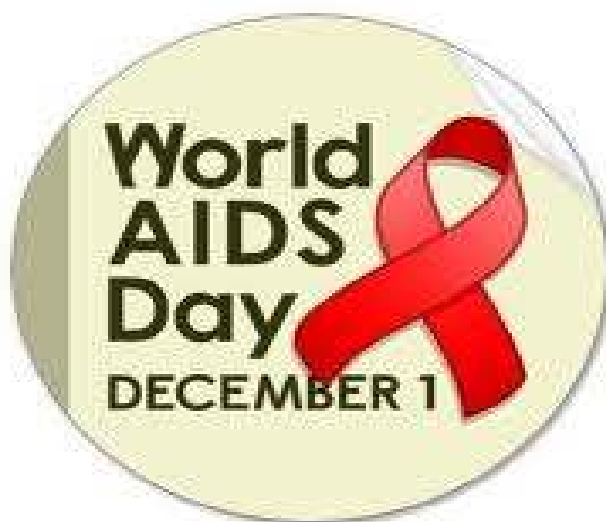
Pembangunan infrastruktur terus meningkat seiring dengan realisasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan kebutuhan tenaga kerja konstruksi setelah 2012 akan mencapai lebih dari 6 juta orang per tahun.

Proyek raksasa yang akan dibangun di antaranya Jembatan Selat Sunda, double track rel kereta api Semarang-Bojonegoro-Surabaya, jalan Trans-Kalimantan, pembangkit listrik tenaga uap Gorontalo, Bandara Internasional Lombok, sarana irigasi di Pulau Buru dan Seram Timur memiliki nilai investasi mencapai triliunan rupiah.

Kondisi tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang berkualitas. Saat ini tenaga kerja konstruksi Indonesia mencapai jumlah 5,7 juta orang atau sebesar 5,3 % dari angkatan kerja nasional. Dari jumlah tenaga kerja konstruksi tersebut 10% merupakan tenaga ahli dan 30% merupakan tenaga terampil. Sisanya sebesar 60% merupakan tenaga kerja kurang terampil.

Di tahun 2012, terkait dengan pencegahan HIV dan AIDS di sektor konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan Sosialisasi (di Palembang dan Makassar), *Training of Trainer* (ToT) di Semarang, Batam, Denpasar, Makassar dan Penyusunan

Produk Hukum Pencegahan HIV & AIDS bagi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia. Program-program tersebut diharapkan terus terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan pelatihan-pelatihan di lingkungan pekerjaan konstruksi. ***
(mh dari berbagai sumber)



Profil : Balai Pelatihan Keterampilan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh

'GERBANG HARAPAN KONSTRUKSI DI BUMI ANDALAS'

(BP Konstruksi) 26 Juli 2011, adalah hari bersejarah bagi pembinaan jasa konstruksi di wilayah Sumatera. Sebab pada hari itu telah resmi berdiri sebuah Balai Pelatihan Keterampilan yang akan mencetak tenaga-tenaga terampil bidang konstruksi yang tentunya kompeten dan berdaya saing, yang diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah Sumatera.

Ya, pada hari Selasa tersebut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan Balai Pelatihan Keterampilan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Badan Pembinaan Konstruksi. Peresmian Balai dilakukan bersamaan dengan peresmian Gedung Workshop Vocational Training Center for Construction Sector (VTCCS) Banda Aceh.

VTCCS merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah India melalui Kementerian Luar Negeri India dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Pembangunan gedung workshop ini ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Aceh pada khususnya dan pulau Sumatera pada umumnya.

VTCCS ini, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri PU mengingat hal ini sangat relevan dengan program pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah di seluruh Indonesia. VTCCS dan program-program Balai nantinya akan mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) guna mendongkrak



pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung oleh pengembangan ekonomi daerah.

Tidak hanya untuk mendukung MP3EI, ketersediaan SDM Konstruksi diperlukan untuk melakukan penetrasi di pasar global sebagai upaya untuk mengeksport jasa konstruksi ke negara lain. "Kita masih kekurangan tenaga ahli dan terampil yang bersertifikat dan diakui di negara-negara lain", ungkap Djoko Kirmanto di sela-sela kunjungan ke bengkel peralatan konstruksi di dalam gedung Workshop VTCCS.

Disampaikan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno, bahwa Pembangunan Gedung Workshop VTCCS ini berawal dari ditandatanganinya MoU antara Pemerintah India yang diwakili Menteri Luar Negeri India dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri PU pada

tahun 2007. Dalam MoU tersebut disepakati bahwa Pemerintah Indonesia membangun gedung workshop dan Pemerintah India memberikan mesin dan peralatan untuk pengembangan kompetensi 9 (sembilan) jabatan kerja di bidang konstruksi, yaitu tukang las, surveyor, tukang besi, tukang pasang ubin, tukang plambing, juru gambar, tukang batu, tukang kayu dan tukang listrik.

Sementara itu Duta Besar Republik India untuk Indonesia Shri Biren Nanda pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa dukungan ini merupakan kelanjutan dari hubungan yang erat antara Indonesia dengan India yang telah terjalin sejak lama. Bahkan menurutnya kelanjutan kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai disini, ke depan Pemerintah India akan memberikan pelatihan kepada trainer yang akan mengoperasikan dan

mengajarkan peralatan-peralatan yang ada di workshop VTCCS. "Kami berharap bantuan ini akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Aceh khususnya", ujar Biren Nanda.

Perjalanan Balai yang masih berusia 'muda' ini, dimulai pada tanggal 11 April 2005 bertempat di Jakarta telah ditandatangani naskah kesepakatan kerjasama antara Kementerian PU dengan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Penggunaan Sementara Lahan Universitas Syiah Kuala untuk pembangunan dan penyelenggaraan VTCCS. Bantuan mesin dan peralatan dari Pemerintah India juga telah datang ke Banda Aceh dan telah dipasang serta diuji coba oleh Hindustan Machine Trade International (HMTI).

Meski terbilang Balai yang baru terbentuk, beberapa prestasi kerja telah dilakukan oleh jajaran Balai Pelatihan Keterampilan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh. Diantaranya Uji Kompetensi dan Sertifikasi Keterampilan Tukang Bidang Konstruksi serta Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan. Uji ini dilaksanakan di Pangkalpinang, sejak tanggal 22 hingga 26 Mei 2012. Selain uji



kompetensi dan sertifikasi dilaksanakan pula penandatanganan Kerjasama Operasi (KSO) Peningkatan tenaga kerja konstruksi antara Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian PU dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bangka Belitung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Setelah itu dilakukan Workshop Competency Based (SKKNI) Skill Upgrading and Certification for Global

Competitive Construction Workforce di Banda Aceh, Selasa (29 Mei 2012, yang dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama operasi (KSO) peningkatan tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Penandatanganan ini melibatkan beberapa pihak antara lain Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi BP Konstruksi Kementerian PU, Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Fakultas Teknik Unsyiah, Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI-Aceh/UPTP), Dinas Bina Marga Cipta Karya PU Provinsi NAD, dan Politeknik Aceh. Dan beberapa pelatihan serta penandatanganan KSO-KSO dengan pihak yang terkait.

Menurut Kepala Balai Pelatihan Keterampilan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Sutjipto, bahkan saat ini sedang ditingkatkan Pelatihan yang melibatkan siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tiada lain karena siswa-siswa SMK yang telah lulus sangat strategis untuk langsung terjun ke lapangan menjadi tenaga terampil konstruksi yang berkualitas.

Hanya saja saat ini ada kecenderungan minat untuk masuk SMK jurusan bangunan menurun dibandingkan pada



jurusan yang lain. Sebab stigma di masyarakat mereka yang lulus dari jurusan bangunan akan menjadi 'tukang'. Padahal lulusan SMK jurusan bangunan secara otomatis akan masuk level dua yang ekuivalen dengan mandor. Untuk itu perlu diberikan kurikulum lebih, seperti kemampuan menggambar desain dan menghitung kebutuhan proyek, agar mereka lebih kompeten dan 'laku' di pasaran.

Niat ini bahkan sudah mendapat dukungan Deustshe Gessellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman. Melalui Principal Advisor GIZ, Kerstin Nagels, mengatakan bahwa tujuan dan upaya yang tengah dilakukan Kementerian PU sejalan dengan usaha yang telah Jerman selama ini lakukan melalui peningkatan kemampuan kaum muda Indonesia terutama yang tidak bekerja melalui pelatihan-pelatihan di SMK dan balai pelatihan.

Memang GIZ selama ini telah menjadi salah satu badan dari negara lain yang membantu upaya recovery Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pasca Tsunami, terutama untuk pendidikan usia muda.

Melalui program Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET) yang selama ini dilaksanakan GIZ di Indonesia, diharapkan Kementerian PU akan semakin menajamkan sasarannya untuk mencetak tenaga kerja konstruksi yang menjadi bintang di panggung sendiri.

Balai Pelatihan Keterampilan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh hadir untuk memenuhi visi terwujudnya Balai Pelatihan Konstruksi sebagai percontohan, pengembangan dan pelatihan industri konstruksi. Untuk mendukung visi ini, Balai yang terletak di Jl. Tgk. Tanoh Abee No.01 Kopelma Unsyiah Darussalam Banda Aceh ini telah dilengkapi sarana dan prasarana yang cukup lengkap, antara lain seperti Ruang Serba Guna berkapasitas 80 orang, kelas 9 ruangan, Workshop di tiga gedung, Mess berkapasitas 35 orang, Perpustakaan, Peralatan konstruksi 9 bidang (Metal, Las,

Perkayuan, Pemipaian, Pengukuran, Batu/Pembetonan, Pembesian, Gambar, dan Listrik), Modul Pelatihan, Instruktur/Asesor, dan seterusnya.

Balai yang telah mendapat sertifikat ISO 9001 - 2008 ini dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang dibantu tiga orang Eselon IV yang terdiri dari : Kepala sub TU Program dan Evaluasi, Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan, dan Kepala Urusan Workshop. Sedangkan pegawai Balai saat ini berjumlah 36 orang dengan jumlah PNS nya sebanyak 13 orang.

Sektor konstruksi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian bangsa. Dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Infrastruktur tersebut diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dan memang kompeten di bidangnya. Balai Pelatihan Keterampilan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh memang baru saja hadir di bumi Andalas, namun semoga ini menjadi pintu pembuka harapan baru akan kehidupan yang lebih baik di dunia jasa konstruksi Indonesia. * (tw)



Sukseskan



KONSTRUKSI INDONESIA 2012



PAMERAN DAN SEMINAR KONSTRUKSI INDONESIA 2012

Parkir Timur Senayan, 29 November - 02 Desember 2012



Kementerian Pekerjaan Umum



Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi

Organized by INMARK Group

